ANALISIS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN HUMAS DAN PROTOKOL DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Persyaratan Dalam Menempuh Derajat

Sarjana S-1

Administrasi Publik

Oleh:

SAMUEL KEVIN
NIM. 07011382025216

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

ANALISIS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN HUMAS DAN PROTOKOL DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada Tanggal 15 Mei 2025 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
Ketua

Drs. Mardianto, M.Si
Anggota

Junaidi, S.IP, M.Si
Anggota

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,	Ketua Jurusan
Prof. Dr. Alfitri, M.Si	**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**
NIP. 196601221990031004	NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN HUMAS DAN PROTOKOL DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SAMUEL KEVIN
NIM. 07011382025216

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 21 Maret 2025

Pembimbing

Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272010931005

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Samuel Kevin
NIM	: 07011382025216
Jurusan	: Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Kinerja Pegawai Humas dan Protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, 21 April 2025

Samuel Kevin

NIM. 07011382025216

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat kamu sampai tujuan, tetapi dari seberapa banyak pelajaran yang kamu ambil sepanjang perjalanan"

"Setiap masalah dalam hidup adalah pelajaran yang harus dipelajari, dan kita menjadi lebih bijaksana dan tangguh seiring berjalannya waktu"

Puji Syukur Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri
2. Ayah, Ibu, Adik dan Keluarga Saya
3. Teman Teman saya
4. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
5. Seluruh Rekan Mahasiswa Administrasi Publik 2020
6. Almamater Kebanggan Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Kinerja Pegawai Humas dan Protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan". Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kekurangan optimal dan disiplin yang dilakukan oleh pegawai humas dan protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja yang dilakukan oleh pegawai humas dan protokol. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui proses wawancara terhadap staff humas dan protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Nasional Kebangsaan Indonesia Sumatera Selatan. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui literatur atau data dokumenter yang ada di bagian humas dan protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai humas dan protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan cukup optimal. Hal tersebut didukung oleh beberapa prinsip kinerja pegawai menurut Bernardin dan Russel yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, membutuhkan pengawasan, hubungan antar perseorangan. Penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kedisiplinan pegawai humas dan protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan melaksanakan kegiatan secara ideal dan motivasi, mampu menyelesaikan persoalan dengan ketentuan yang tepat, meningkatkan evaluasi kinerja, mengambil solusi atas hal yang belum tercapai, dan menjalin komunikasi antar sesama rekan pegawai.

Kata Kunci : Kinerja, Pegawai, Humas dan Protokol

Pembimbing Skripsi

Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H ., M.Si
NIP. 198801272019031005

Palembang, 21 Maret 2025

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study is entitled "Analysis of Public Relations and Protocol Staff Performance of the South Sumatra Provincial DPRD. This study was motivated by the lack of optimal and disciplined work carried out by public relations and protocol staff of the South Sumatra Provincial DPRD. The purpose of this study is to determine the performance of public relations and protocol staff. The data used in this study are primary data obtained through interviews with public relations and protocol staff of the South Sumatra Provincial DPRD and the Chairperson of the South Sumatra Indonesian National Movement Non-Governmental Organization. While secondary data were obtained through literature or documentary data in the public relations and protocol section of the South Sumatra Provincial DPRD. The analysis technique used in this study is qualitative with observation, interview, and documentation methods. The results of this study indicate that the performance of public relations and protocol staff of the South Sumatra Provincial DPRD has been running quite optimally. This is supported by several principles of employee performance according to Bernardin and Russel, namely quality, quantity, timeliness, cost effectiveness, need for supervision, interpersonal relationships. This research is expected to optimize and improve the discipline of public relations and protocol employees of the South Sumatra Provincial DPRD by carrying out activities in an ideal and motivated manner, being able to resolve problems with appropriate provisions, improving performance evaluation, taking solutions to things that have not been achieved, and establishing communication between fellow employees.

Keywords : Performance, Employees, Public Relations and Protocol

Advisor

Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005

Palembang 21 March 2025

Chairman of the Public Administration

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh penyertaan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis diberi kesehatan, kelancaran, dan kesempatan mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Kinerja Pegawai Humas Dan Protokol DPRD Sumatera Selatan".

Dalam penyelesaian studi dan penulisan ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Sastra (S1) Ilmu Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan serta kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya.

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dr. M Nur Budiyanto., S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Januar Eko Aryansyah., S.IP, S.H.,M.Si selaku dosen pembimbing penulis
5. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Kedua orang tua sebagai motivasi bagi penulis
7. Seluruh dosen jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2020

9. Serta semua pihak yang berkontribusi selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang,

Samuel Kevin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **II**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **III**
LEMBAR ORISINALITAS ..... **IV**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **V**
ABSTRAK ..... **VI**
ABSTRACK ..... **VII**
KATA PENGANTAR ..... **….. .VIII**
DAFTAR ISI ..... **X**
DAFTAR TABEL ..... **XII**
DAFTAR GAMBAR ..... **XIII**
DAFTAR SINGKATAN ..... **XIV**
BAB I PENDAHULUAN 15
1.1 Latar Belakang 15
1.2 Rumusan Masalah 24
1.3 Tujuan Penelitian 24
1.4 Manfaat Penelitian 24
1.4.1 Manfaat Teoritis 24
1.4.2 Manfaat Praktis 25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **26**
2.1. Landasan Teori 26
2.2. Kinerja 26
2.3. Humas Pemerintah 27
2.4. Teori yang Digunakan Dalam Penelitian 28
2.5. Penelitian Terdahulu 29
2.6. Kerangka Berpikir 45
BAB III METODE PENELITIAN **47**
3.1. Jenis Penelitian 47
3.2. Definsi Konsep 48
3.3. Fokus Penelitian 49
3.4. Jenis dan Sumber Data 51

3.4.1. Data Primer 51
3.4.2. Data Sekunder 51
3.5. Informan Penelitian 51
3.6. Teknik Pengumpulan Data 52
3.7 Teknik Analisis Data 54
3.8 Sistematika Penulisan 55
3.9 Jadwal dan Lokasi Penelitian 57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 58
4.1 Profil Instansi 58
4.2 Deskripsi Informan Penelitian 69
4.3 Hasil Penelitian 69
4.4 Pembahasan 91
BAB V PENUTUP 110
5.1 Kesimpulan 110
5.2 Saran 112
DAFTAR PUSTAKA 114
LAMPIRAN 116

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Indikator Kepuasan Kinerja 20

Tabel 2. Penelitian Terdahulu..... 30

Tabel 3. Fokus Penelitian.....49

Tabel 4. Informan Penelitian.....69

Tabel 5. Daftar Pegawai PNS Humas dan Protokol 94

Tabel 6. Pencapaian kinerja pelayanan Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan Humas dan Protokol.....94

Tabel 7. Matrik Temuan Penelitian 104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 46
Gambar 2. Lokasi Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan 62
Gambar 3. Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....62
Gambar 4. Logo DPRD Provinsi Sumatera Selatan 63
Gambar 5. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....65
Gambar 6. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 65
Gambar 7. Suasana dikantor pegawai humas dan protokol Sumatera Selatan.....73
Gambar 8. LSM GNKI bersama ibu kassubag aspirasi dalam penyampaian aspirasi dari LSM 77
Gambar 9. Staff humas menyampaikan informasi dalam kegiatan halalbihalal 79
Gambar 10. Pimpinan humas dan protokol sedang mengikuti apel pagi.....80
Gambar 11. Staff humas dan mahasiswa/i magang sedang mengoutputkan majalah atau media untuk dikirim 82
Gambar 12. Melakukan pengecekan terhadap peralatan dikantor humas dan protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan 84

DAFTAR SINGKATAN

PNS	: Pegawai Negeri Sipil
ASN	: Aparatur Sipil Negara
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
GNKI	: Gerakan Nasional Kebangsaan Indonesia
SOP	: *Standart Operational Procedure*
KNID	: Komite Nasional Kebangsaan Indonesia
PERDA	: Peraturan Daerah
RENSTRA	: Rencana Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam suatu lingkungan masyarakat, senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting meskipun bangsa Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja. Demikian sama juga dengan suatu organisasi, masyrakat sangat menentukan sekali dalam suatu terciptanya keberhasilan atau tidaknya organisasi ke arah pencapaian tujuan.

Tingkat sumber daya manusia dalam hal ini sangat diperhatikan dan dipertimbangkan karena kualitas sumber daya manusia dapat memicu menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional jika sumber daya manusia tersebut mengalami suatu kemunduran atau kegagalan. Dalam hal ini, pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana pemerintahan dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan yang telah dibuat dan juga ada pengaruh dari masyarakat sebagai partsipan sebagai pemikir dalam mengeluarkan saran dan ide bagi pegawai yang tujuannya sesuai dengan isi UUD 1945.

Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri yang bekerja dengan perjanjian kerja yang dibuat dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), diamana di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ada terminologi yang terbagi menjadi dua pembagian Pegawai Pemerintahan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kinerja Pegawai merupakan capaian suatu hasil yang dilakukan dan dikerjakan oleh pegawai atau pekerja selama mereka diberi mandat dan tugas.

Menurut Robbins (2003) bahwa kinerja pegawai adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Dalam studi manajemen kinerja pekerja atau pegawai ada hal yang memerlukan pertimbangan yang penting sebab kinerja individual seorang pegawai dalam organisasi merupakan bagian dari kinerja organisasi, dan dapat menentukan kinerja dari organisasi tersebut. Berhasil tidaknya kinerja pegawai yang telah dicapai organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegawai secara individu maupun kelompok. Kinerja *(performance)* merupakan perilaku organisasional yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Kinerja mencakup segi usaha, loyalitas, potensi, kepemimpinan, dan moral kerja. Penilaian kinerja adalah kegiatan atau proses pengumpulan, analisis, dan atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari pegawai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan kulitas kerja, pembinaan selanjutnya

Secara administratif Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan, Pemerintah Kota Palembang didukung oleh 11.342 orang PNS pada tahun 2020. Kota Palembang sendiri umumnya sebagai pusat pemerintahan provinsi Sumatera Selatan, pusat pendidikan, pusat pelayanan, kesehatan dan perdagangan barang dan jasa.

Seiring perjalanan roda pemerintahan tidak terlepas dari kinerja aparat pemerintahannya. Suatu pemerintahan daerah yang baik berhubungan dengan sumber daya aparatur yang dimiliki. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari bagaimana kinerja pegawai atau aparatur pemerintahannya. Memasuki periode pembangunan Sumatera Selatan pada lima tahun (2019-2024), Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah Sumatera Selatan merupakan salah satu pelaku pembangunan yang

diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian harapan sesuai Visi dan Misi. Melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran suatu keberhasilan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah ditetapkan kedudukan Sekretariat DPRD yaitu merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Adapun tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Pasal 4 dan 5, dimana tugas Sekretariat Dewan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsinya adalah:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
c. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD.
d. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.
e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Sekretaris Dewan dilengkapi dengan 4 (empat) bagian yang semuanya memiliki subbagian, yaitu : Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Legislasi, Bagian Keuangan dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah

sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 50 Tahun 2016, disajikan berikut ini

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Hal-hal lain yang dianggap penting diluar tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan yaitu pertama, berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu, pertama membantu menyiapkan Raperda, kedua memobilisasi pakar untuk membantu pembahasan sesuatu Perda atau Raperda, ketiga membantu dalam memberi masukan materi yang dibahas dalam sesuatu Perda atau Raperda. Kedua mempertemukan kesepahaman dan kesamaan pemikiran mengenai sesuatu pembahasan Perda atau Raperda antara Anggota Dewan dengan pihak Pemerintah Daerah. Ketiga berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Pengawasan Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu, pertama memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang pengawasan, kedua membantu memberi data mengenai sesuatu objek yang mendesak, perlu dan patut segera dilakukan pengawasan, ketiga membantu menyiapkan data terinci mengenai sesuatu objek yang akan dilakukan pengawasan.

Dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu unsur pendukung dalam melayani dan memfasilitasi masyarakat Kota Palembang dan lain lain. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdapat 5

Komisi dalam mejalankan masing masing bidangnya sebagai sarana pendukung dan penyaring aspirasi masyarakat terutama di Bagian Humas dan Protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, mengolah perpustakaan, dokumentasi, serta melayani aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD. Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu, pertama subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan, kedua subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga, ketiga subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Humas dan Protokol dituntut untuk memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat, pelayanan yang professional dan berkualitas sangat erat kaitannya dengan kinerja dari Bagian Humas Protokol itu sendiri. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 Pasal 41 ditetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan ketentuan ini DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Salah satu dari Bagian Humas dan Protokol selalu menampung dan memfasilitasi aspirasi masyarakat kota Palembang.

Tabel 1. Indikator Kepuasan Kondisi Kinerja

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	BB	BB	BB	A	A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	B	B	B	B	B	A
3	Persentase Inovasi yang terpilih masuk TOP 99	10,71	12	14	16	18	20
4	Nilai SAKIP (Skor)	BB (78,71)	A (81 - 82)	A (82-83)	A (83-84)	A (84-85)	A (85-86)
5	Level Maturitas SPIP	3,02	3,2	3,4	3,6	3,8	4
6	Indeks Integritas Daerah	-	60	65	70	72,5	75
7	Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya	82%	85%	86%	87%	88%	89%

Sumber: Renstra DPRD Pronvinsi Sumsel Tahun 2019-2023

Pada Tabel 1.2 Indikator Kepuasan Kondisi Kinerja Indeks Integritas Daerah Tahun 1 dan Tahun 2 masih dibawah angka 70 dan dalam hal ini indeks integritas daerah itu menjadi tantangan bagi instansi tersendiri agar tetap selalu mengoptimalkan integritas. Dalam upaya mengoptimalkan integritas aspek aspek tersebut meliputi manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Aspek Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat dan cepat.

Didalam bagian Humas dan Protokol masih sering terjadi keterlambatan dalam melaksanakan Apel Pagi di Lapangan, dari beberapa orang yang ada di dalam bagian Humas dan Protokol DPRD Sumsel hanya 3-5 orang terkadang mengikuti Apel tersebut.

Selanjutnya masalah yang sering terjadi adalah miskomunikasi. Miskomunikasi yang sering terjadi antar pegawai adalah ketika mengelola surat masuk dan surat keluar, sering terjadi miskomunikasi dalam pendistribusiannya sehingga menjadi kendala untuk kegiatan yang menyangkut surat tersebut. Lalu contoh miskomunikasi lainnya yang sering terjadi berhubungan dengan masyarakat adalah, ketika ada orang yang memasukkan surat peminjaman lapangan, pada saat itu pegawai pengelola surat masuk dan surat keluar di Subbagian Humas dan Protokol hanya memberi tahu untuk datang kembali 3 hari kemudian. Setelah 3 hari ketika

pemberi surat menanyakan perkembangannya, pegawai yang bertanggung jawab menanyakan nomor surat yang diberikan namun dikarenakan ketidaktahuan pemberi surat untuk menyimpan nomor surat tersebut.

Bagian Humas dan Protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan melekat dengan tugas dan Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, baik sebagi pengatur acara, publikasi dan dokumnetasi. Terkait hal tersebut, tugas bagian protokol untuk terus dipantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemimpin Bagian Humas dan Protokol oleh Kabag dan Kasubbag sehingga semua berita acara terliput oleh media. Namun ketika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol masih memiliki kendala seperti masih adanya tumpang tindih beban pekerjaan yang diberikan pada pegawai sehingga membuat pegawai merasa dengan berat beban pekerjaan yang harus dipikul dan tidak merata pada semua pegawai.

Dalam hal tersebut maka masih diperlukan kinerja pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang lebih optimal serta disiplin untuk mengoptimalisasi tugas yang telah diembannya. Kinerja suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan jelas terlihat serta seberapa jauh tugas dan fungsinya dilaksanakan dengan maksimal.

Analisis terhadap kinerja organisasi publik menjadi sangat penting, dengan melihat kinerja setelah ada perubahan terhadap suatu organisasi publik. Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada

masyarakat merupakan perwujudan dan fungsi aparat negara sebagai abdi atau pelayan masyarakat disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama dalam pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Dengan perubahan organisasi tersebut aparat dituntut lebih mampu memperbaiki kinerja dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa perlu adanya analisis kinerja pegawai dalam proses meningkatkan kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Berdasarkan pengamatan yang telah di lakukan oleh penulis dalam perkembangannya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Analisis Kinerja Pegawai Humas Dan Protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kinerja pegawai Subbagian Humas dan Protokol dalam melayani masyarakat Kota Palembang
2. Apa yang menjadi faktor penghambat kinerja pegawai Subbagian Humas dan Protokol?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai Subbagian Humas dan Protokol dalam melayani aspirasi masyarakat
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang di alami pegawai Subbagian Humas dan Protokol

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan, penjelasan, dan gambaran mengenai pelaksanaan tahap kinerja pegawai oleh humas di DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta dapat menjadi bahan penelitian bagi Mahasiswa selanjutnya yang ingin meneliti lebih mengenai kajian tentang Kinerja Pegawai Humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan solusi dalam menganalisis kinerja pegawai di Humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, D. (2019). PERANAN MOTIVASI DAN KOMPETENSI: *ANALISIS KINERJA PEGAWAI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PASER*. At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen, 3(2). https://doi.org/10.31602/atd.v3i2.2032

Hariyono, P. S., & Suseno, Y. D. (n.d.). *ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO*. 13.

Mirnasari, T., & Sari, N. S. (2020). *PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN ASPIRASI HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG*. Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS), 4(3), 37–44. https://doi.org/10.24967/jmms.v4i3.798

Oktavianti, F. N. (n.d.). *ANALISIS TATA RUANG DALAM KENYAMANAN KERJA DAN OPTIMALISASI KINERJA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA*.

Pebrianti, T. (2013). *PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN*.

Putra, D. (n.d.). *PROGRAM S.1 JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA*.

Rahmadhani, Y., & Iskandar, A. (2016). *Analisis Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Disiplin Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pegawai Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Jurnal Komunikasi Pembangunan,* 14(2). https://doi.org/10.46937/14201613764

Rizkasari, S., Kardhinata, H., & Isnaini, I. (2022). *Analisis Kinerja Pegawai di Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 574–583. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1253

Saputra, I. (n.d.). *PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU*.

Bintoro, & Daryanto. (2017). MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN.

Yogyakarta: GAVA MEDIA.

Kasmir. (2018). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (TEORI DANPRAKTIK).

Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Narimawati, U. (2010). METODE PENELITIAN : DASAR PENYUSUN PENELITIAN

EKONOMI. Jakarta: Genesis. Narimawati, U., Sarwono, J., Munandar, D., & Winanti, M. B. (2020). METODE

PENELITIAN DALAM IMPLEMENTASI RAGAM ANALISIS (Untuk Penulisan

Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Yogyakarta: ANDI.

Noor, J. (2012). METODOLOGI PENELITIAN : SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN

KARYA ILMIAH. Jakarta: KENCANA.

Sedarmayanti. (2018). PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI,KINERJA, DAN

PRODUKTIVITAS KERJA . Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian, S. P. (2012). Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Siagian, S. P. (2012). TEORI MOTIVASI DAN APLIKASINYA. Jakarta: PT RINEKA

CIPTA.

Sugiyono. (2014). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN

R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). METODE PENELITIAN MANAJEMEN. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, A. T., & Rosidah. (2018). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

PENDEKATAN TEORETIK DAN PRAKTIK UNTUK ORAGNISASI PUBLIK.

Yogyakarta: Gava Media.

Sutrisno, E. (2020). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. Jakarta: KENCANA.